



APBD Perubahan

"Sarin Canang" Dianggarkan Rp 3 Miliar

Tabanan (Bali Post) -

Meski anggaran perubahan hanya akan berjalan efektif tiga bulan, ada pos anggaran yang luar biasa besarnya. Salah satunya *sarin canang* yang dianggarkan Rp 3 miliar.

Dari informasi yang dihimpun di kalangan Dewan Tabanan, jumlah anggaran tersebut mencuat dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) yang digelar beberapa hari se-

belum sidang penetapan APBD Perubahan 2015, Senin (7/9) kemarin. Dalam rapat banggar itu muncul anggaran semu yang belakangan diketahui hanya digunakan untuk membayar *sarin canang* sebelumnya. Yang mengagetkan, dari total Rp 3 miliar yang dianggarkan, ternyata Rp 2,5 miliar sudah digunakan sebelum APBD Perubahan dalam bentuk *voucher*. Tentu akan menjadi pertanyaan,

mungkinkah dana sebanyak itu bisa dihabiskan dalam waktu tiga bulan pelaksanaan APBD perubahan.

Terkait informasi tersebut, Ketua DPRD Tabanan Ketut Suryadi membenarkan anggaran *sarin canang* sempat menjadi perdebatan alot dalam rapat anggaran. Pihaknya sudah menanyakan kepada bagian Kesra dan hal itu menurutnya diperbolehkan. "Katanya ada



Bali Post/kmb28

Ketut Suryadi

aturan yang memungkinkan hal itu dilakukan. Kami akan telaah. Jika tidak bisa, ya silpa (sisa lebih pagu anggaran)," ucapnya usai sidang penetapan APBD Perubahan 2015.

Pria yang akrab disapa Boping itu mengakui besarnya dana untuk *sarin canang* dalam waktu tiga bulan akan menjadi pertanyaan dalam realisasinya selama tiga bulan. (kmb28)

Edisi : Selasa 8 September 2015

Hal : 14



✓ Bahan Kampanye dan APK Sedot Rp 0,5 M



Bali Post/gik

BROSUR - Tim pemenang dari salah satu pasangan calon mengambil brosur dan selebaran dari Kantor KPU Karangasem, Senin kemarin.

Amlapura (Bali Post) -

Pengadaan bahan kampanye dan APK (alat peraga kampanye) menyedot anggaran cukup besar. Proses pengadaan untuk Pilkada Karangasem yang tahun ini dibebankan kepada KPU Karangasem, menyedot APBD Karangasem sebesar setengah miliar rupiah lebih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat KPU Karangasem Karangasem, I Gede Suwenda, Senin (7/9) kemarin, mengatakan anggaran sebesar itu digunakan untuk pengadaan bahan kampanye seperti selebaran dan brosur masing-masing yang dicetak 471.120 lembar untuk tiga pasangan calon. Dengan harga satuan masing-masing Rp 250 dan Rp 500 per lembar, selebaran menghabiskan anggaran sebesar Rp 117.780.000, sedangkan brosur Rp 235.560.000. Sementara untuk APK, berupa baliho sebanyak 15

buah dengan harga satuan Rp 1.300.000, menghabiskan anggaran Rp 19.500.000, spanduk 468 lembar dengan harga satuan Rp 80.000, menghabiskan anggaran Rp 37.440.000. Sedangkan umbul-umbul, KPU mencetak 480 lembar, dengan harga satuan Rp 139.000 menghabiskan anggaran Rp 66.720.000.

Jika ditotal dengan biaya pajak 10 persen, maka pengadaan bahan kampanye dan APK ini menghabiskan anggaran Rp 524.700.000. "Pengadaan ini tendernya dimenangkan UD Baliho Jaya. Proses cetaknya cukup singkat, hanya tujuh hari," tegasnya. Dari jumlah cetak sebanyak itu, untuk APK sudah dipasang oleh KPU. Sedangkan bahan kampanye dibagikan kepada masing-masing tim pemenang, Senin (7/9) kemarin, sebanyak 157.040, sesuai jumlah kepala keluarga di seluruh Karangasem.

Komisioner KPU I Gede Krisna Adi Widana, usai penyerahan bahan kampanye tersebut, menegaskan bahan kampanye itu nantinya akan disampaikan langsung kepada seluruh kepala keluarga di Karangasem. Ketua Pokja Kampanye ini meminta tim pemenang setiap pasangan calon harus benar-benar menyampaikannya kepada pemilih, sebagai bentuk pendidikan politik oleh partai politik kepada pemilih. "Penyerahan ke setiap rumah, bisa dilakukan selama masa kampanye. Brosur dan selebaran ini harus sampai ke pemilih, agar pemilih tahu apa visi misi dan program pasangan calon," tegasnya.

Masing-masing perwakilan tim pemenang pasangan calon berjanji segera menyampaikan brosur dan selebaran tersebut ke konstituennya sesuai dengan jadwal zona kampanye yang diberikan KPU. (kmb31)

Edisi : Selasa, 8 Sept 2015

Hal : 13



Dana Hibah Tak Bisa Cair

Dewan Sebut Kesalahan Eksekutif

Denpasar (Bali Post) -

Dana hibah Pemprov Bali untuk desa pakraman hingga saat ini masih belum ada yang cair. Proses pencairan terhambat lantaran terbentur Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang itu, hibah hanya bisa diberikan kepada lembaga organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia. Sedangkan desa adat, desa pakraman, atau subak, tidak ada yang berbadan hukum.

Anggota DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan, hal ini terjadi akibat kesalahan eksekutif yang tidak mau mendaftarkan desa adat. Kalau desa adat didaftarkan, maka hibah secara otomatis bisa dicairkan tanpa harus mengurus badan hukum. "Ini kesalahan eksekutif dalam menyikapi Undang-undang Desa. Padahal, isi undang-undang sudah jelas sekali mengakomodir kepentingan Bali. Usulan dalam draf otonomi khusus yang diajukan oleh Provinsi Bali dulu itu, hampir semua masuk dalam Undang-undang Desa ini," jelasnya di DPRD Bali, Senin (7/9) kemarin.

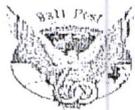
Kariyasa menambahkan, saat ini persoalan hibah memang masih bisa diatasi dengan membuat peraturan gubernur. Namun ke depan jika memungkinkan, Bali harus menyepakati untuk mendaftarkan desa adat. Begitu juga harus dicari aturan hukum yang bersifat permanen agar ke depan tidak ada masalah terkait pencairan hibah.

Anggota dewan lainnya, Nyoman Parta, mengaku sudah memprediksi bila posisi desa adat akan makin sulit ke depan. Terbukti, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yang dibuat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, kini menghambat proses pencairan dana hibah untuk desa pakraman. "Inilah yang menyebabkan dulu kami ngotot agar desa adat yang didaftarkan. Mereka yang menolak desa adat didaftarkan harus bertanggung jawab," ujarnya.

Berdasarkan data data Dinas Kebudayaan Bali, tercatat 102 desa pakraman di sembilan kabupaten/kota yang semestinya menerima dana hibah masing-masing Rp 200 juta, serta 174 subak dan subak abian yang masing-masing menerima Rp 50 juta. (kmb32)

Edisi : Selasa, 8 Sept 2015

Hal : 2



Dituntut 11 Tahun

Mantan Bos Adhi Karya Minta Bebas

Denpasar (Bali Post) -

Pascadituntut selama 11 tahun penjara dan mengembalikan kerugian negara Rp 12 miliar oleh jaksa dari Kejari Denpasar, mantan bos atau mantan Kepala Divisi VII PT Adhi Karya, Wijaya Imam Sentosa, Senin (7/9) kemarin diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Dalam pledoinya, terdakwa melalui kuasa hukumnya, Agus Sujoko dan Edy Hartaka, di depan majelis hakim diketuai Cening Budiana, pada pokoknya meminta supaya dibebaskan dari segala tuntutan jaksa.

"Dakwan jaksa tidak mendasar. Jaksa tidak bisa membuktikan dakwaannya. Karenanya, kami minta supaya majelis hakim memutuskan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Serta mengembalikan seluruh harta benda terdakwa yang disita," pinta kuasa hukum terdakwa dalam pledoinya.

Pengacara terdakwa mengatakan, dakwaan jaksa tidak jelas. Dalam fakta persidangan, dakwaan tentang penggelapan asuransi, penggelapan dana di PT Adhi Karya dan pembukaan rekening, dijadikan satu-kesatuan sehingga peristiwa pidana tidak terbukti secara jelas. Karena, dalam asuransi pihak-pihak yang terlibat berbeda dengan dugaan penggelapan di PT Adhi Karya maupun pembukaan rekening. Dalam dugaan penggelapan, pihak PT Adhi Karya melakukan kerja sama dengan PT Waskita Karya dan orang yang terlibat dan menerima aliran di dalam dakwaan, tidak disebutkan bersama-sama dengan terdakwa melakukan korupsi. Sehingga unsur setiap orang yang didakwakan jaksa tidak terbukti.

Dalam pledoinya, juga dibeber beberapa nama penerima aliran dana. Di antaranya Ir. Itung Prasaja dan Ichwan Djaelani. Namun, jaksa tidak pernah menyebutkan peran mereka serta tidak adanya tersangka lain dalam perkara aquo. "Dengan demikian, unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana, tidak terbukti. Sehingga perkara ini menjadi tidak jelas dan gelap," tandas Agus Sujoko.

Sebelumnya, JPU menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sesuai pasal primer Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. JPU menuntut Imam dengan hukuman 11 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara serta mengganti kerugian negara Rp 12,3 miliar dengan ketentuan, jika tidak mampu membayar maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika masih belum cukup, akan diganti dengan hukuman penjara selama lima tahun. (kmb37)

Edisi : Selasa, 8 Sept 2015

Hal : 3



DPRD Setujui Rancangan APBD

Perubahan 2015^v



SIDANG - DPRD Tabanan akhirnya menyetujui Rancangan APBD Perubahan 2015. Rancangan tersebut selanjutnya diajukan ke Pemprov Bali untuk dievaluasi dan diverifikasi.

SETELAH melalui serangkaian pembahasan, Rancangan APBD Perubahan Tabanan 2015 akhirnya mendapatkan persetujuan dari DPRD setempat. Selanjutnya, rancangan anggaran perubahan tersebut akan diajukan ke Pemprov Bali untuk dievaluasi dan diverifikasi.

Persetujuan tersebut diputuskan dalam sidang paripurna yang digelar di DPRD Tabanan, Senin (7/9) kemarin. Sidang yang dipimpin Ketua Dewan I Ketut Suryadi, dihadiri Penjabat Bupati Tabanan I Wayan Sugiada.

Atas persetujuan tersebut, Sugiada menyampaikan rasa terima kasihnya, karena rancangan anggaran perubahan telah dibahas sesuai mekanisme yang berlaku dengan lancar. "Hal itu tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab, komitmen, kesungguhan, dan kerja sama yang baik dari pimpinan dan seluruh anggota dewan," katanya saat

memberikan sambutan.

Dia berharap tahapan evaluasi dan verifikasi di Pemprov Bali secepatnya membuahkan hasil. Dengan demikian, rancangan anggaran perubahan yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD bisa ditetapkan sesegera mungkin dan seluruh program yang dianggarkan bisa dilaksanakan.

Secara garis besar, sambungnya, penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rancangan anggaran perubahan sebesar Rp 264 miliar lebih. Anggaran pada pos pendapatan ini terdiri atas pajak daerah Rp 92,974 miliar, retribusi Rp 42 miliar, dan PAD lain-lainnya yang sah Rp 121,658 miliar dari jumlah pendapatan daerah Rp 1,596 triliun.

Sementara belanja daerah dianggarkan Rp 1,702 triliun terdiri atas belanja langsung Rp 561,616 miliar dan belanja tidak

langsung Rp 1,140 triliun. "Ini berarti pada rancangan APBD perubahan terdapat defisit. Biasanya defisit itu direncanakan ditutupi dari sisa lebih pagu anggaran (silpa) 2014," imbuh Sugiada.

Masih menyinggung soal anggaran, Sugiada menyadari bahwa selama ini ada kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan. "Kondisi ini memberikan tekanan pada Rancangan APBD 2015 dalam mengalokasikan anggaran untuk program prioritas dan program yang dibutuhkan," jelasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap berupaya dengan sumber daya yang ada mewujudkan pembangunan yang adil dan merata serta berkesinambungan dalam dimensi kewilayahan atau lintas sektoral. (ad430)

Edisi : Selasa, 8 September 2015

Hal : 14



Maksimalkan Serapan APBD

Pimpinan SKPD Diinstruksikan Evaluasi Program Seminggu Sekali

Gianyar (Bali Post) – Bupati Gianyar A.A. Gde Agung Bharata memimpin langsung apel bulanan Pemkab Gianyar di Kantor Bupati Gianyar, Senin (7/9) kemarin. Pada kesempatan itu, Agung Bharata menekankan beberapa poin penting kepada jajarannya. Salah satunya menyangkut upaya memaksimalkan serapan APBD. Pimpinan SKPD diinstruksikan melakukan evaluasi program atau kegiatan minimal satu kali dalam seminggu.

Bupati Agung Bharata di hadapan seluruh jajaran Pemkab Gianyar mengatakan, situasi perekonomian di seluruh dunia saat ini sedang mengalami krisis. Maka dari itu, jajaran pemerintahan termasuk di Kabupaten Gi-

anyar, mulai dari tingkat pimpinan hingga staf harus memaksimalkan kinerja dan pelayanan ke masyarakat. Kinerja dan pelayanan yang maksimal ke masyarakat diharapkan mampu merespons kebutuhan masyarakat sehingga akan mendukung upaya peningkatan perekonomian.

Terkait hal tersebut, pihaknya juga mengingatkan seluruh jajaran Pemkab Gianyar agar berupaya memaksimalkan serapan APBD. Tahun ini ditargetkan serapan APBD minimal 85 persen. Untuk mencapai hal tersebut, maka jajaran pimpinan di Pemkab Gianyar khususnya pimpinan SKPD rutin melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program yang telah dianggarkan dalam APBD. "Monitoring setidaknya

dilakukan sekali dalam satu minggu," tegasnya.

Dengan monitoring yang intensif dan berkelanjutan, kata dia, akan dapat diketahui kendala yang dihadapi dalam eksekusi program. Kemudian, kendala tersebut harus dicari solusi bersama. "Kalau ada masalah, bicarakan dengan pimpinan. Bahkan, saya siap membantu memberikan solusi," katanya.

Di sisi lain, Bupati Agung Bharata kembali menekankan masalah keamanan. Pihaknya meminta seluruh jajaran Pemkab Gianyar turut peduli dan proaktif menjaga keamanan lingkungan. Salah satu cara yaitu dengan menyosialisasikan ke masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala ancaman keamanan. "Jangan sampai hal yang terjadi di Thailand terjadi di Bali, khususnya Kabupaten Gianyar. Karena jika hal tersebut terjadi akan sangat sulit untuk mengembalikan citra pariwisata kita," pesannya.

Pihaknya mengaku yakin, masyarakat Bali khususnya Gianyar, paham akan dampak terjadinya gangguan keamanan terlebih dalam skala besar seperti peristiwa bom Bali. Tentunya masyarakat tidak ingin peristiwa serupa terjadi. Oleh karena itu, dia kembali meminta peraturan wajib lapor 1 x 24 jam dilaksanakan terutama bagi tamu asing yang berkunjung. (kmb25)



Bali Post/ded

INSTRUKSI - Apel bulanan Pemkab Gianyar dilangsungkan Senin (7/9) kemarin. Pada kesempatan itu, Bupati Gianyar Agung Bharata menginstruksikan jajarannya untuk memaksimalkan serapan APBD.

Edisi : Selasa, 8 September 2015

Hal : 9



Penjabat Bupati Minta Zona Perlindungan Tahura Diubah

Bendesa Adat Kelan Tolak Teken Surat MADP

Mangupura (Bali Post) –

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung akan melayangkan surat permohonan ke Gubernur Bali agar diadakan perubahan zona blok perlindungan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai. Surat yang ditandatangani Penjabat Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka ini bertujuan agar proyek normalisasi Tukad Mati bisa dilanjutkan.

Dalam surat nomor 610/3739/Sekret tersebut, juga didukung aspirasi masyarakat melalui Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) Kecamatan Kuta No. 010/MA-KUTA/IX/2015, menekankan dalam perubahan blok perlindungan menjadi blok pemanfaatan khusus pada rencana pembangunan *long storage* di alur sungai muara Tukad Mati sepanjang 1.700 meter dengan lebar 50 meter.

Penjabat Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka, Senin (7/9) kemarin mengatakan, dengan adanya surat

permohonan tersebut, diharapkan proyek normalisasi Tukad Mati dapat dilanjutkan sambil menunggu proses revisi. "Dalam perubahan zona itu telah tercantum hanya untuk normalisasi. Tidak ada hal-hal lain selain penyelesaian normalisasi Tukad Mati yang panjangnya 1,7 kilometer dengan lebar 50 meter," tegasnya.

Dia juga menanggapi adanya kekhawatiran jika perubahan zona tersebut memberikan peluang bagi investor. Penjabat asal Buleleng ini memastikan hal itu tidak akan terjadi.

Mengingat, perubahan yang diajukan hanya untuk kawasan normalisasi muara Tukad Mati, bukan yang lainnya. "Apabila ada pembangunan lainnya, tentunya itu adalah sebuah pelanggaran, karena itu adalah zona perlindungan," tegasnya lagi.

Ketua Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) Kecamatan Kuta Wayan Swarsa saat dihubungi mengakui aspirasi masyarakat yang dituangkan lewat MAPD Kuta tidak ada kaitannya dengan proyek reklamasi. "Surat itu tidak ada hubungannya dengan reklamasi, karena sudah jelas yang disepakati adalah penanggulangan sampah dan bencana banjir. Jadi, manfaatnya terbatas," katanya.

Kendati demikian, dukungan Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) Kecamatan Kuta

No. 010/MA-KUTA/IX/2015 belum dapat dikatakan mewakili masyarakat. Sebab, dari enam desa adat yang ada, satu desa adat yakni Bendesa Adat Kelan menolak untuk menandatangani surat tersebut. "Surat tersebut sebetulnya belum dilayangkan, karena dari enam desa adat, satu desa adat yakni Kelan belum menandatangani. Artinya, surat itu belum sah," ujarnya.

Bendesa Adat Kelan I Made Sugita membenarkan jika belum menandatangani surat tersebut dikarenakan tidak sependapat jika proyek yang menelan dana miliaran rupiah itu harus mengubah zonasi di Tahura. "Saya sempat menandatangani surat itu, tetapi karena tahu surat tersebut isinya mengubah blok pemanfaatan Tahura, dukungan saya cabut," pungkasnya. (kmb27)

Edisi : Selasa, 8 Sept 2015

Hal : 3



Target PAD Disepakati

Rp 408 Miliar

Gianyar (Bali Post) -

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gianyar, Senin (7/9) kemarin, menyepakati sejumlah poin penting dalam RAPBD Perubahan tahun 2015. Beberapa di antaranya menyangkut target pendapatan asli daerah (PAD) serta alokasi anggaran bansos dan hibah.

Anggota Banggar yang juga anggota Komisi III DPRD Gianyar, Luh Suciningsih, mengungkapkan, pada pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disepakati mengenai target PAD pada RAPBD 2015 sebesar Rp 408 miliar. Jumlah itu meningkat sekitar Rp 38 miliar dibandingkan PAD yang dipasang di APBD induk 2015. Sumber kenaikan pendapatan masih didongkrak dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR). "Sumber

lainnya seperti dari pajak penerangan jalan," katanya.

Pihaknya berharap pemerintah mampu meraih target yang telah disepakati tersebut. Terlebih lagi mengingat masih cukup banyak potensi pajak yang bisa diraih. "Tentunya kami di dewan khususnya di Komisi III akan melakukan fungsi pengawasan serta mendorong agar eksekutif mampu mencapai bahkan melebihi target tersebut," katanya.

Sementara itu, untuk dana bansos dan hibah, oleh kedua lembaga disepakati tetap dianggarkan meskipun sampai sekarang belum ada kepastian dari pemerintah pusat mengenai aturan persyaratan bagi penerima.

Anggota Banggar A.A. Gede Agung Wiramantara menyatakan, anggaran untuk bansos dan hibah tetap dipasang.

Sedangkan untuk pencairannya nanti harus dibuatkan aturan khusus. "Untuk pencairannya menunggu peraturan bupati," ujar Ketua Komisi III DPRD Gianyar ini.

Suciningsih menambahkan, dana bansos dan hibah di RAPBD Perubahan 2015 yakni sekitar Rp 9 miliar. Sebelumnya, eksekutif belum berani mengalokasikan anggaran tersebut. Namun, setelah mengetahui bahwa di tingkat provinsi alokasi bansos dan hibah tetap dianggarkan dengan payung hukum Peraturan Gubernur, akhirnya eksekutif sepakat kedua alokasi anggaran itu tetap dirancang. "Pada intinya tadi juga dibahas, untuk pengajuan bansos dan hibah tahun 2017 nanti harus dari sekarang calon penerimanya mengurus badan hukum," katanya. (kmb25)

Edisi : Selasa, 8 September 2015

Hal : 7



Bali Post



Telan Rp 1,6 Miliar

Mangkarak

Gedung SMKN 1 Bangli



MANGKRAK - Bangunan gedung di SMKN 1 Bangli yang mangkrak.

Bali Post/ina

Edisi : Selasa 8 September 2015

Hal : 8



Sambungan - - -

Bangli (Bali Post) -

Pembangunan fasilitas gedung sekolah oleh Pemerintah Provinsi Bali di SMKN 1 Bangli mangkrak sejak hampir setahun terakhir. Padahal untuk membangun gedung tiga lantai tersebut, dana yang sudah dihabiskan Rp 1,6 miliar lebih.

Berdasarkan pantauan Senin (7/9) kemarin, bangunan gedung mangkrak tersebut berdiri di bagian selatan lingkungan sekolah setempat.

Sampai saat ini bangunan yang menghadap ke utara tersebut masih berupa kerangka beton. Hanya beberapa sisi yang sudah ditembok bata. Tak hanya itu bangunan gedung tersebut juga belum dipasang atap. Kepala SMKN 1 Bangli I Gede Aster saat dikonfirmasi kemarin menjelaskan, gedung tiga lantai tersebut dibangun oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Total dana untuk pembuatan gedung itu mencapai Rp 1,625 miliar. Di pertengahan jalan proses pembangunannya terpaksa dihentikan lantaran pihak pemborong proyek tersebut di-*black list*.

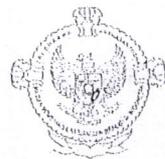
Proses pembangunannya terpaksa dihentikan sejak Desember 2014 karena pemborongnya tidak bisa menyelesaikan pembangunannya sehingga di-*black list* terangnya.

Dia menjelaskan sesuai dengan rancangan, bangunan tiga lantai tersebut akan digunakan menjadi beberapa ruangan. Pada lantai atas rencananya akan digunakan sebagai aula,

sementara lantai tengah untuk ruang laboratorium yakni laboratorium komputer, pemasaran, IKJ dan administrasi. Sedangkan lantai bawah yang berupa basement akan dijadikan tempat parkir.

Aster mengungkapkan, sejak mangkraknya proses pembangunan gedung tersebut pihaknya sebetulnya sempat berkeinginan untuk melanjutkan pembangunannya dengan memasang atap. Hal itu dimaksudkan agar bangunan itu dapat dimanfaatkan. Akan tetapi, keinginan tersebut ternyata tidak diizinkan oleh pihak konsultan. Dikatakan Aster, meski kondisi bangunan mangkrak, namun pihaknya selama ini sudah sempat memanfaatkan bangunan tersebut untuk menggelar pertemuan. Di samping itu lantai bawah berupa basement juga kerap digunakan sebagai tempat parkir.

Sementara itu untuk kejelasan mengenai kelanjutan pembangunan tersebut pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Disdikpora Provinsi Bali. "Dari hasil koordinasi, nanti pembangunannya akan dilanjutkan 2016 mendatang. Yang perlu dilanjutkan adalah memasang atap dan *finishing*," terangnya. (kmb40)



Transportasi Khusus Pelajar

Bus Sekolah dan Halte Dianggarkan di APBD-P

Gianyar (Bali Post) –

Pemkab Gianyar telah merancang sistem transportasi khusus untuk pelajar. Pendanaannya dimulai dari APBD Perubahan Tahun 2015. Diharapkan, tahap awal sistem transportasi yang akan banyak memberikan kemudahan bagi pelajar di Gianyar itu sudah bisa diterapkan dalam beberapa bulan ke depan.

Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishubinfokom) Kabupaten Gianyar, Cokorda Gde Agusnawa, Senin (7/9) kemarin, mengungkapkan, sistem transportasi ini berupa bus sekolah yang nantinya terintegrasi dengan angkutan pedesaan (angdes) dan angkutan kota (angkot) di tiap kecamatan. Di APBD Perubahan 2015, Pemkab Gianyar mengalokasikan sejumlah dana untuk pengadaan bus dan halte penunjang.

“Pengadaannya nanti di Perhubungan (Dishubinfokom Gianyar, red). Tapi untuk anggarannya, saya tidak hafal. Yang jelas, sampai haltenya dianggarkan,” kata Agusnawa.

Bus sekolah yang rencananya digratiskan itu akan melayani sejumlah rute. Di tiap kecamatan dipastikan akan disediakan halte khusus. Bus akan menjemput para siswa menuju sekolah masing-masing. Sejauh ini, Kecamatan Payangan yang menjadi prioritas layanan tersebut dengan pertimbangan kondisi geografis dan minimnya layanan transportasi umum di wilayah setempat.

Pihaknya berharap realisasi anggaran untuk pengadaan bus dan halte



Cokorda Gde Agusnawa

Bali Post/ded

bisa berjalan sesuai target yakni pada Desember tahun ini. Pasalnya, ada kekhawatiran mengingat rentang waktu yang tersisa cukup singkat. “Waktunya sudah dekat sekali. Masalah tender

Edisi : seksi, 8 September 2015

Hal : 9



Sambungan - -

terutama yang paling kita khawatirkan. Kalau semua sesuai rencana, kita targetkan Januari nanti layanannya sudah optimal," ujarnya.

Dijelaskannya, layanan bus sekolah diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan transportasi publik yang ramah anak. Selain itu, bus sekolah juga diharapkan mampu mengangkat kondisi moda transportasi umum lain seperti angkot dan andes yang tengah terpuruk. Pasalnya, moda transportasi tersebut nantinya akan diintegrasikan dan akan saling dukung satu sama lain.

Agusnawa menyatakan, pihaknya sudah melakukan kajian guna mengefektifkan layanan andes dan angkot dalam mendukung program Kabupaten Layak Anak (KLA) dari sektor transportasi. Untuk itu, pihaknya mengaku akan kembali mengusulkan anggaran untuk program tersebut. "Kita maunya seperti yang di Tabanan. Ada subsidi bagi angkot dan andes untuk mengangkut anak sekolah. Apakah nantinya kita berikan voucher atau bagaimana, kita lihat perkembangannya nanti," katanya.

Lebih lanjut Agusnawa meminta dukungan semua komponen masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas layanan transportasi umum di Gianyar.

Pihaknya berharap masyarakat tidak buru-buru apriori mengingat kebutuhan akan transportasi umum yang representatif sangatlah penting pada era kekinian. (kmb25)